

## Catatan Penelitian: Persepsi nelayan terhadap kebijakan subsidi perikanan dan konservasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

### *Research note: Perception of fishermen community on fishery subsidies and conservation policies in Aceh Besar District, Aceh Province*

Zainal A. Muchlisin<sup>1\*</sup>, Nur Fadli<sup>1</sup>, Arifsyah M. Nasution<sup>2</sup>, Rika Astuti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Budidaya Perairan, Koordinator Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111.

<sup>2</sup>The World Wildlife Fund (WWF), Banda Aceh; <sup>3</sup>Jaringan Kualisi Untuk Laut Aceh (Kuala), Banda Aceh. Email korespondensi: muchlisinza@yahoo.com

**Abstract.** *The objective of the present study was to collect information of fishermen perceptions in Aceh Besar district. The study was conducted from June to August 2012, while the field survey conducted on 21 to 28 June 2012 at some fishing villages in Aceh Besar district namely: (a) Baitussalam and Mesjid, (b) Peukan Bada, (c) Leupung, Lhoknga and Lhoong, (d) Pulo Aceh, (e) Seulimum. The Results showed that most of respondents were in the productive age (31-45 years). The majority of the respondents have received subsidies from a variety of sources both government and non-governmental organizations. The common type of subsidy were in the form of goods (in kinds) namely: boats, fishing gear and boat engines, and small portion in cash. In addition, the majority of fishermen stated that the type of assistance provided was in accordance with their needs as fishermen and most fishermen are still expected that fisheries subsidies should be continued. In regard to environmental and conservation issues that most fishermen agreed with the conservation area in the district of Aceh Besar. However, most of the respondents stated that they have not been involved in conservation activities. The fishermen need training in fishing technology, post harvest and conservation.*

**Keywords:** *Habitat degradation, fish, skills and capital*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Besar terhadap kebijakan subsidi perikanan dan program konservasi untuk dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan oleh pihak terkait. Penelitian ini dilakukan pada Juni sampai Agustus 2012. Survei lapangan dilaksanakan pada 21-28 Juni 2012 di lima kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar, meliputi kecamatan: (a) Baitussalam dan Mesjid Raya, (b) Peukan Bada, (c) Leupung, Lhoknga dan Lhoong, (d) Pulo Aceh, (e) Seulimum. Sebanyak 62 orang nelayan telah diwawancarai secara langsung, hasil penelitian menunjukkan umumnya nelayan di Kabupaten Aceh Besar berada di usia produktif (31-45 tahun). Sebagian besar nelayan pernah mendapatkan bantuan dari berbagai sumber baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Lembaga yang paling banyak atau sering memberikan bantuan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar dan lembaga swadaya masyarakat/NGO. Jenis bantuan yang umum diterima adalah dalam bentuk barang (*in kinds*) antara lain kapal, alat tangkap dan mesin kapal, sebagian kecil dalam bentuk uang tunai. Mayoritas nelayan menyatakan jenis bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai nelayan dan sebagian besar nelayan tersebut masih mengharapkan agar kebijakan subsidi perikanan tetap dilanjutkan. Terkait dengan isu konservasi, sebagian besar nelayan menyatakan setuju dengan adanya kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Namun, hampir sebagian besar responden mengaku belum pernah terlibat dalam kegiatan konservasi baik pelatihan maupun terlibat secara aktif di lapangan. Nelayan mengharapkan adanya pelatihan dalam hal teknik penangkapan ikan yang baik, pengolahan ikan dan konservasi

**Kata kunci:** Kerusakan habitat, ikan, ketrampilan dan modal

## Pendahuluan

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten yang berada di pesisir Aceh tepatnya di perairan utara dan barat Aceh. Aceh Besar memiliki garis pantai sepanjang 344 km dengan luas wilayah perairan lautnya mencapai 2.796 km<sup>2</sup> dan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 21 buah dengan 2 buah pulau kecil terluar (Muchlisin *et al.*, 2012a). Pesisir dan laut Aceh Besar memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi diantaranya 1.155 Ha terumbu karang dan hutan bakau seluas 980,82 Ha (DKP Aceh Besar, 2011).

Sektor kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor penting bagi masyarakat Aceh Besar. Jika dilihat dari besarnya wilayah laut Kabupaten Aceh Besar, dibutuhkan anggaran yang besar pula untuk mensubsidi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan Aceh Besar. Walaupun secara global subsidi dalam arti luas ditentang banyak pihak karena dianggap membebani anggaran pemerintah (Wikaniati, 2011), namun kebijakan ini dipandang masih diperlukan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Aceh Besar khususnya. Untuk itu pemberian subsidi perikanan yang dilakukan harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran, dan perlu disertai dengan skema *fisheries management* (Satria, 2005).

Keragaan subsidi perikanan bahan bakar minyak (BBM) solar dan non BBM di Kabupaten Aceh Besar telah dilaporkan oleh Muchlisin *et al.* (2012a; 2012b), diungkapkan bahwa kebijakan subsidi yang perikanan di Aceh Besar yang dijalankan selama ini belum menjurus kepada *green investment* karena salah satu alasannya masih menumpukan kepada

subsidi pengadaan kapal dan alat tangkap, walaupun hal ini juga masih *debatable* namun para pakar *fisheries management* bersepakat bahwa subsidi perikanan untuk pengadaan kapal dan alat tangkap berpotensi tinggi menyebabkan *over fishing* (Ghofar *et al.*, 2008). Namun dilain pihak, kondisi nelayan Indonesia khususnya di Aceh Besar masih sangat memprihatinkan dan masih memerlukan bantuan pemerintah untuk mengangkat taraf hidup mereka, oleh karena itu pendapat dan harapan mereka juga patut didengar untuk dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan subsidi perikanan di Aceh Besar, agar subsidi yang diberikan akan berdampak positif, baik dari segi ekonomis maupun ekologis.

Paper ini memaparkan beberapa masalah yang dihadapi oleh nelayan di Kabupaten Aceh Besar dan persepsi mereka terhadap kebijakan subsidi perikanan yang selama ini dijalankan serta upaya konservasi sumberdaya perikanan untuk dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan subsidi perikanan oleh pihak terkait di Aceh Besar khususnya dan Provinsi Aceh umumnya.

## Bahan dan Metode

### Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mulai Juni sampai Agustus 2012. Survei lapangan dilaksanakan pada 21-28 Juni 2012. Lokasi survei meliputi perkampungan nelayan di Kecamatan : (a) Baitussalam dan Mesjid Raya, (b) Peukan Bada, (c) Leupung, Lhoknga dan Lhoong, (d) Pulo Aceh, (e) Seulumum.

### Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data tersebut diperoleh dari wawancara dengan menggunakan kusioner semi tertutup terhadap nelayan dan tokoh-tokoh kunci nelayan di masing-masing lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan antara lain:

- Karakteristik responden, meliputi; umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah tanggungan dan lain-lain.
- Proses dan biaya produksi; jenis alat tangkap, biaya produksi, jenis ikan tangkapan, pendapatan dan lain-lain.
- Subsidi; jenis barang bantuan yang pernah diterima baik oleh nelayan budidaya dan nelayan tangkap atau nelayan pengolah; kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, kegunaan bantuan dalam membantu proses produksi, dan seberapa besar dampaknya, dan lain-lain.
- Cash transfer subsidy*: jumlah uang yang diterima, tujuan pemberian untuk apa, digunakan untuk apa, apakah sesuai kebutuhan, apakah dapat membantu dalam proses produksi, seberapa besar dampaknya.
- Capacity building*: jenis pelatihan yang pernah diikuti, berapa lama, siapa yang melakukan, apakah pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini, apakah pelatihan tersebut sesuai dengan harapan, apakah pelatihan tersebut dapat membantu dalam proses produksi, seberapa besar dampaknya.

### Responden

Pemilihan responden dalam penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan alasan dan kriteria yang telah ditetapkan. Total jumlah responden yang terlibat lebih kurang 62 orang (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah dan distribusi responden berdasarkan ukuran/jenis kapal pada masing-masing lokasi kajian

No.	Lokasi	Perahu tanpa motor	Boat tempel	< 5 GT	< 10 GT	Jumlah
1.	Baitussalam	-	5	5	-	10
2.	Mesjid Raya	3	9	2	5	19
3.	Lhoknga	-	3	5	-	8
4.	Leupung	1	2	4	-	7
5.	Peukan Bada	2	6	-	-	8
6.	Seulumum	-	10	-	-	10
Total		6	35	16	5	62

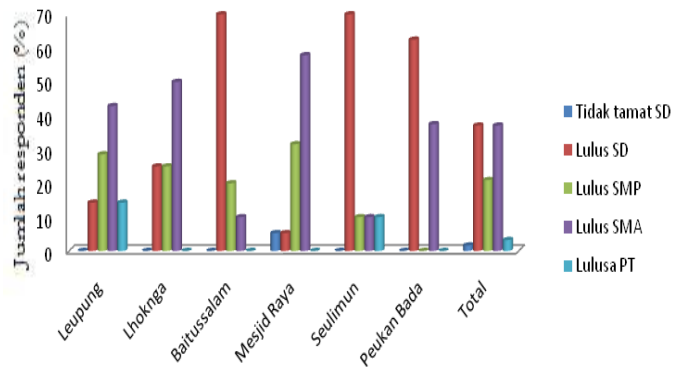
### Analisa data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan laporan-laporan terkait lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

### Karakteristik responden

Sebanyak 62 orang nelayan tangkap telah diwawancarai dalam survei ini, dimana proporsi responden yang berkeluarga dan yang belum berkeluarga (lajang) adalah seimbang. Jika ditinjau dari segi umur terlihat bahwa sebagian besar adalah pada kisaran usia produktif (31-45 tahun), namun demikian sebagian besar nelayan di Kecamatan Leupung berusia lebih muda berbanding kecamatan lainnya. Jika ditinjau dari tingkatan pendidikan maka sebagian besar nelayan di Kabupaten Aceh Besar adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kecamatan maka tingkat pendidikan yang lebih baik dijumpai pada nelayan di Kecamatan Mesjid Raya, sementara Kecamatan Baitussalam, Seulimeun dan Pekanbada sebagian besar nelayan hanya lulusan Sekolah Dasar (Gambar 1).



Gambar 1. Tingkat pendidikan nelayan kabupaten Aceh Besar berdasarkan kecamatan.

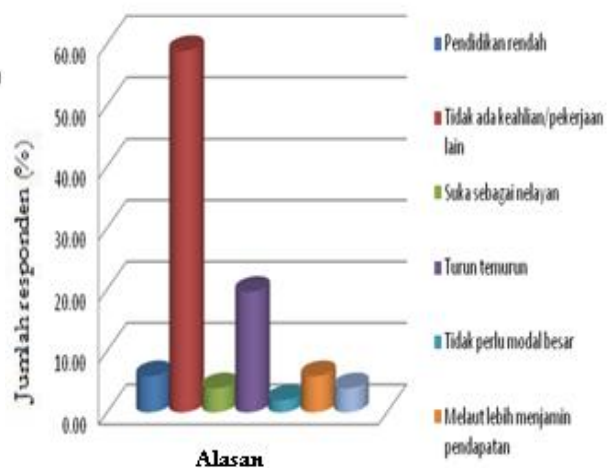
Hasil survei menunjukkan hampir semua anak nelayan tidak ada yang putus sekolah (tidak tamat SMA), hanya 2 orang anak nelayan di Kecamatan Baitussalam teridentifikasi tidak tamat SMA. Hal ini menunjukkan perhatian keluarga nelayan akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka sudah semakin baik. Namun demikian, sangat sedikit anak nelayan yang dapat melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, mungkin disebabkan karena biaya kuliah yang tinggi. Pemerintah melalui Dirjen Pendidikan Tinggi telah meluncurkan program beasiswa Bidik Misi yang khusus diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu, termasuk dari anak-anak nelayan, untuk itu diharapkan keluarga nelayan khususnya di Aceh Besar dapat memanfaatkan peluang ini.

Sebagian besar responden nelayan (>50%) tidak memiliki pekerjaan sampingan, dan bagi mereka yang memiliki pekerjaan sampingan jenis pekerjaan yang umum dilakukan adalah bertani dan buruh bangunan (Gambar 2). Pekerjaan nelayan yang geluti saat ini adalah pekerjaan turun temurun dari orang tua, kecuali bagi responden di Kecamatan Mesjid Raya dan Seulimeun (Gambar 3). Umumnya responden mengaku alasan memilih pekerjaan sebagai nelayan karena tidak ada pekerjaan atau keahlian lain yang mereka miliki disamping rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Namun demikian, sebagian besar dari mereka di semua kecamatan menyatakan ingin terus mengeluti pekerjaan sebagai nelayan. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak ada pilihan lain bagi mereka akibat dari tidak adanya keahlian tambahan dan tingkat pendidikan yang rendah.

Ketiadaan ketrampilan tambahan pada hampir sebagian besar nelayan menyebabkan produktifitas mereka menjadi rendah terutama pada masa-masa angin barat dimana sebagai besar nelayan memutuskan tidak melaut, untuk menyokong kehidupan selama tidak melaut mereka sangat bergantung kepada toke bangku (juragan) dengan cara berhutang, menyebabkan mereka sulit melepaskan diri dari jeratan rentenir. Oleh karena itu introduksi ketrampilan tambahan baik untuk nelayan maupun untuk keluarga mereka sangat diperlukan dengan harapan masa tidak melaut dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat mendatangkan *income* bagi keluarga.



Gambar 2. Jenis pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh nelayan Aceh Besar



Gambar 3. Alasan memilih pekerjaan sebagai nelayan

### Isu subsidi perikanan

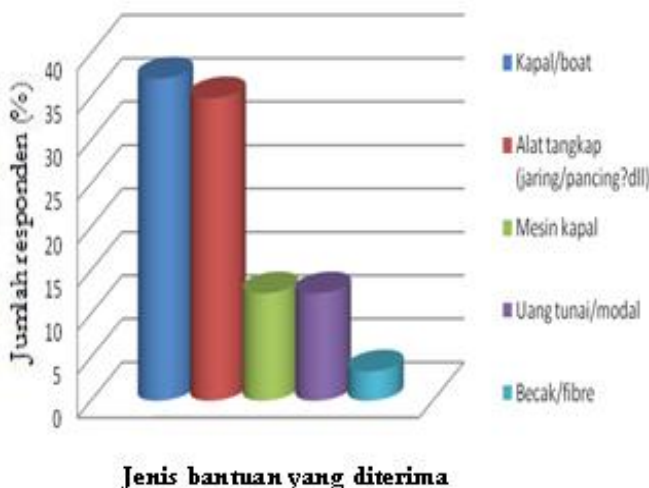
Hasil penelitian mencatat bahwa hampir 80% nelayan responden pernah mendapatkan bantuan dari berbagai sumber baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Jenis bantuan yang umum diterima adalah dalam bentuk barang (*in kinds*) antara lain kapal, alat tangkap dan mesin kapal, sebagian kecil ada juga yang menerima dalam bentuk uang tunai. Secara umum jenis barang bantuan boat dan alat tangkap diberikan secara berimbang, namun di Kecamatan Leupung sebagian besar diberikan dalam bentuk kapal/boat, dan sebaliknya di Kecamatan Baitussalam jenis bantuan yang diberikan umumnya berupa alat tangkap (Gambar 4).

Nelayan Aceh Besar mengaku bahwa lembaga yang paling banyak atau sering memberikan bantuan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar dan lembaga swadaya masyarakat/NGO. Namun di Kecamatan Seulimeun dan Peukanbada bantuan lebih dominan datang dari NGO, sedangkan di Kecamatan Lhoknga berimbang antara pemerintah dan NGO. Secara umum lebih dari 50% responden mengaku jenis bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai nelayan (Gambar 5), namun demikian di beberapa nelayan di Kecamatan Seulimeun mengaku belum puas dengan bantuan yang diberikan, dengan alasan boat bantuan yang diberikan berkualitas rendah dan jika dalam bentuk uang, jumlahnya tidak mencukupi untuk modal kerja.

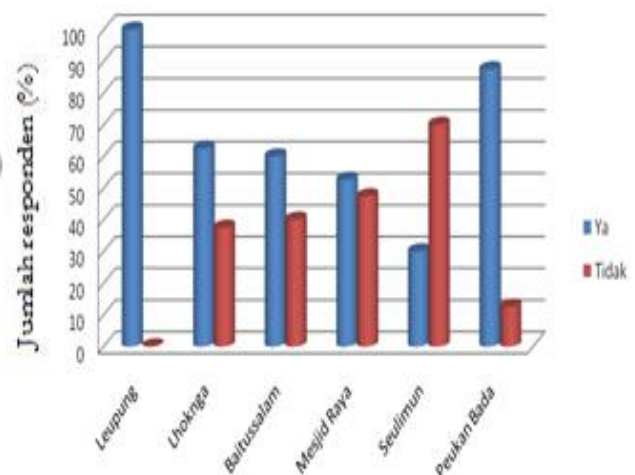
Lebih kurang 60% responden mengaku barang bantuan yang pernah diterima masih ada dan masih digunakan dengan baik, namun demikian lebih dari 20% diantaranya mengaku barang bantuan yang diterima sudah tidak ada lagi, dan umumnya mereka tidak memberikan alasan kenapa barang tersebut tidak ada lagi, namun sebagian kecil dari padanya menjawab bahwa barang tersebut rusak dan dijual. Sebagian besar nelayan di Aceh Besar masih mengharapkan agar kebijakan subsidi perikanan tetap dilanjutkan dan mereka pada umumnya mengharapkan bantuan berupa kapal dan alat tangkap (Gambar 6). Umumnya responden berpendapat bahwa bantuan yang disalurkan sebaiknya dilakukan secara perorangan (*individual*), namun demikian nelayan di Baitussalam berpendapat penyaluran sebaiknya dilakukan secara berkelompok. Terdapat tiga kendala utama nelayan dalam menjalankan usahanya, yaitu cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi, kerusakan kapal dan alat tangkap serta mahalnya harga BBM (Gambar 7). Saat ini sebagian besar nelayan Aceh Besar belum dapat membeli BBM (*solar*) pada harga resmi pemerintah, umumnya mereka membeli BBM pada pengencer (*pihak ketiga*) dengan harga berkisar Rp5.000 s/d Rp6.000 per liter (Muchlisin *et al.*, 2012a).

Lebih kurang 60-75% responden mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan apapun baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta/NGO, dan bagi mereka yang pernah mengikuti pelatihan, jenis pelatihan yang paling banyak diikuti (60%) adalah teknik penangkapan ikan secara modern, umumnya pelatihan tersebut (>40%) dilakukan oleh NGO, hanya kurang dari 10% yang dilakukan oleh pemerintah, dan sayangnya hanya sebagian kecil dari mereka mengaku pelatihan tersebut bermanfaat, dengan alasan tidak sesuai dengan kebiasaan dan penggunaan alat tangkap pada nelayan setempat, seperti pelatihan yang diberikan menggunakan alat tangkap modern seperti *fish finder*, sedangkan nelayan di daerah yang disurvei masih menggunakan alat tangkap yang tradisional, sehingga pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan, hanya sebagian kecil saja manfaat yang diperoleh dari pelatihan yang diberikan. Dimasa depan nelayan Aceh Besar mengharapkan beberapa jenis pelatihan, yaitu pelatihan teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pelatihan konservasi, pengelolaan koperasi, merajut jaring, budidaya perikanan, pengolahan ikan dan jenis-jenis ketrampilan lainnya untuk mendukung wirausaha (Gambar 8).

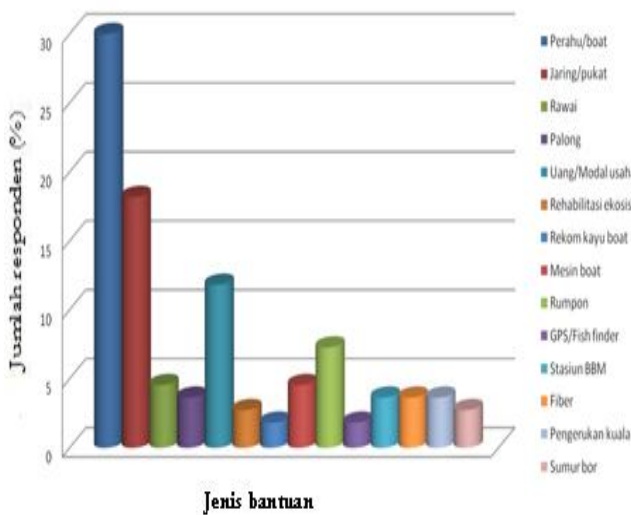
Nelayan Aceh Besar mendukung dan masih mengharapkan subsidi perikanan yang dilakukan oleh pemerintah, namun sayangnya para nelayan umumnya masih mengharapkan bantuan yang diberikan berupa kapal dan alat tangkap. Jika dipandang perlu mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kapal dan alat tangkap, sebaiknya perlu dijalankan secara hati-hati dan terbatas dengan mempertimbangkan kondisi stok sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 (Selat Malaka) dan WPP 572 (Samudera Hindia) serta dilakukan secara terencana dan dibina pengoperasian dan pengelolannya dengan baik atau dengan kata lain adanya upaya peningkatan kapasitas nelayan, agar sejalan dengan prinsip-prinsip perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan (Muchlisin *et al.*, 2012b).



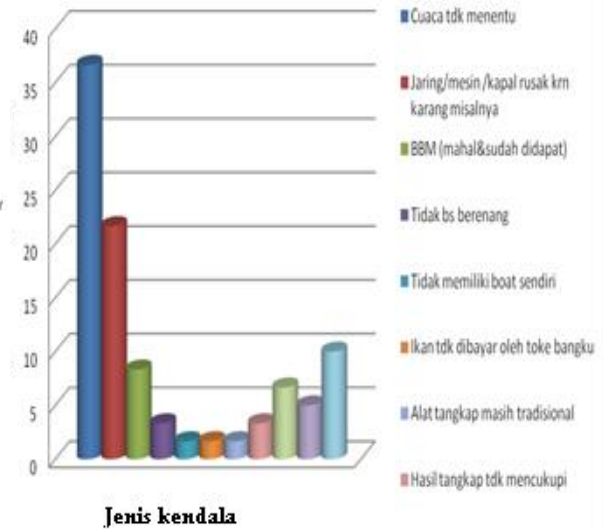
Gambar 4. Proporsi jenis bantuan yang diterima oleh nelayan responden.



Gambar 5. Kesesuaian bantuan yang diterima dengan kebutuhan sebagai nelayan berdasarkan kecamatan.



Gambar 6. Jenis bantuan yang diharapkan oleh nelayan Aceh Besar di masa depan.



Gambar 7. Beberapa kendala yang dihadapi oleh nelayan Aceh Besar.

### Isu degradasi habitat dan konservasi

Nelayan di Aceh Besar mengaku terjadi penurunan hasil tangkapan saat ini berbanding 5 tahun lalu (Gambar 9), menurut nelayan hal ini disebabkan karena perubahan musim tangkap dan kerusakan habitat. Perubahan musim tangkap kemungkinan disebabkan pergeseran siklus musim hujan-kemarau akibat pengaruh El Nino (Muhammad *et al.*, 2012). Menurut nelayan, kerusakan habitat disebabkan oleh penebangan hutan bakau dan pemakaian bahan kimia dan bom sehingga merusak terumbu karang. Perubahan iklim akan memberikan dampak kepada distribusi ikan baik secara spasial maupun temporal, secara jangka panjang akan memberikan pengaruh kepada ekosistem laut (Grafton, 2009), misalnya pengasaman air laut yang memberi dampak kepada biota yang hidup didalamnya.

Nelayan menilai pemerintah belum serius membantu nelayan mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti perbaikan kondisi ekosistem. Menurut pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Besar bahwa pemerintah telah melakukan beberapa program konservasi sumberdaya perikanan dan mensosialisasikannya melalui lembaga adat Penglima Laot, namun sayangnya sebagian besar dari nelayan belum mengetahui adanya kebijakan Pemkab Aceh Besar tentang rencana penetapan kawasan konservasi di Aceh Besar (Gambar 10), namun demikian sebagian besar nelayan menilai kawasan konservasi diperlukan (Gambar 11). Dari hasil wawancara ini terlihat bahwa masih ada sebagian nelayan yang belum memahami akan peran penting kawasan konservasi bagi keberlanjutan usaha penangkapan mereka, oleh karena ini menjadi tantangan bagi pemerintah setempat dan kalangan pengiat lingkungan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui seminar dan penyuluhan. Berdasarkan SK Bupati Aceh Besar No. 190 tahun 2011 telah ditetapkan 16 kawasan konservasi di Aceh Besar, diharapkan dengan adanya kawasan konservasi ini dapat menjadi pemicu lahirnya inisiatif pendapatan alternatif masyarakat di lokasi KKPD tersebut, seperti ekowisata, produk pasca tangkap/panen.

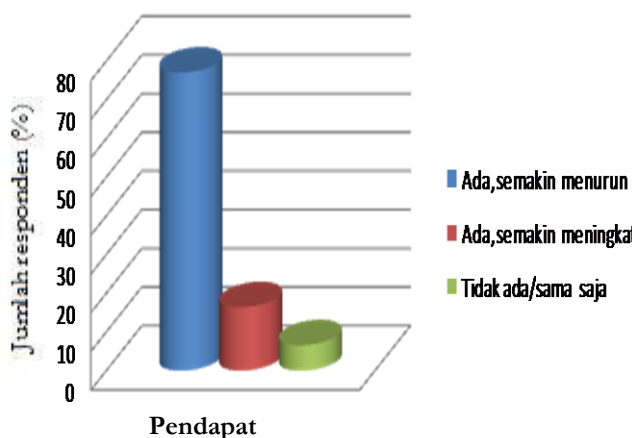
Hampir semua nelayan di Kabupaten Aceh Besar mengaku tidak pernah menggunakan alat tangkap yang merusak, misalnya pukat harimau, racun dan bom ikan, namun ada 10% nelayan di Kecamatan Peukanbada pernah melakukannya beberapa tahun lalu, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan lagi karena mereka sudah sadar akibat buruk yang ditimbulkan oleh aktifitas tersebut. Namun demikian, disinyalir kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan racun (potassium) masih marak di perairan Aceh Besar, biasanya dilakukan pada malam hari dengan peralatan selam untuk menangkap ikan-ikan karang jenis tertentu. Menurut hasil survei dijumpai pengelolaan sampah dan oli bekas sudah cukup baik, dimana sebagian besar nelayan sudah menampung oli bekas kapal dan bahkan beberapa diantaranya menggunakan ulang untuk keperluan lain, demikian pula halnya dengan sampah sudah ditampung disuatu



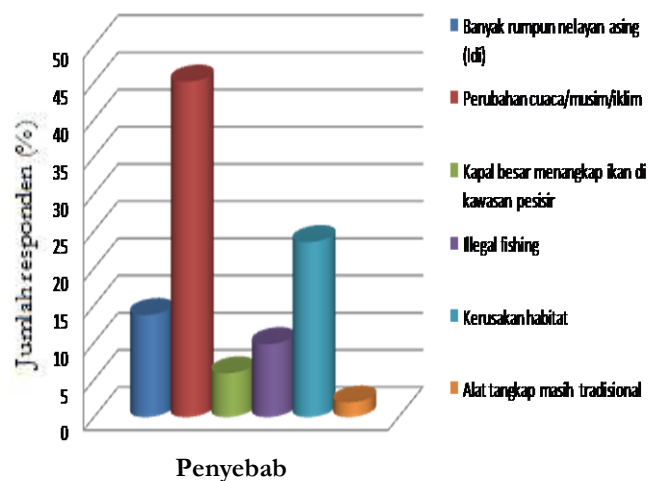
Gambar 8. Jenis-jenis pelatihan yang diharapkan oleh nelayan di masa depan.



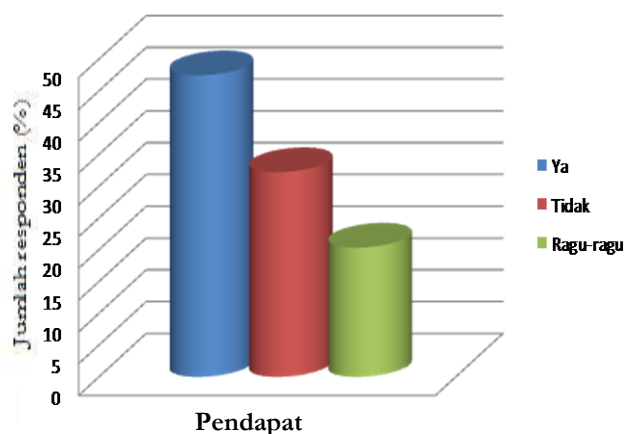
tempat untuk seterusnya dibakar. Namun sayangnya hampir sebagian besar nelayan responden mengaku belum pernah terlibat dalam kegiatan konservasi baik pelatihan maupun terlibat secara aktif di lapangan, namun demikian ada lebih kurang 20% nelayan responden di Kecamatan Baitussalam, Lhoknga dan Mesjid Raya pernah terlibat dalam beberapa pelatihan konservasi yang dilakukan oleh pihak universitas, NGO atau pemerintah (Gambar 12).



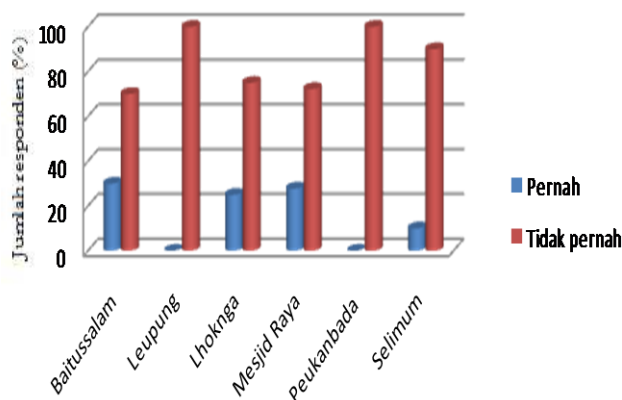
Gambar 9. Persepsi masyarakat nelayan terhadap hasil tangkapan ikan saat ini berbanding 5 tahun lalu



Gambar 10. Persepsi nelayan terhadap penyebab turunnya hasil tangkapan ikan



Gambar 11. Persepsi nelayan tentang perlu tidaknya kawasan konservasi.



Gambar 12. Pengakuan nelayan terhadap keterlibatan mereka dalam kegiatan konservasi berdasarkan kecamatan

## Kesimpulan

Nelayan di Kabupaten Aceh Besar umumnya berada di usia produktif (31-45 tahun). Sebagian besar nelayan pernah mendapatkan bantuan dari berbagai sumber baik dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Jenis bantuan yang umum diterima adalah dalam bentuk barang (*in kinds*) antara lain kapal, alat tangkap dan mesin kapal, sebagian kecil dalam bentuk uang tunai. Lembaga yang paling banyak atau sering memberikan bantuan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar dan lembaga swadaya masyarakat/NGO. Mayoritas responden menyatakan jenis bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai nelayan dan sebagian besar nelayan tersebut masih mengharapkan agar kebijakan subsidi perikanan tetap dilanjutkan. Sebagian besar nelayan Aceh Besar tidak memiliki ketrampilan tambahan untuk itu diperlukan adanya introduksi ketrampilan tambahan yang siklus produksinya cepat/singkat. Terkait dengan isu perubahan iklim dan konservasi, sebagian besar nelayan menyatakan setuju dengan adanya kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Namun, hampir sebagian besar responden mengaku belum pernah terlibat dalam kegiatan konservasi baik pelatihan maupun terlibat secara aktif di lapangan.

## Ucapan Terimakasih

Penelitian ini didanai oleh The *World Wildlife Fund* (WWF) bekerjasama dengan Jaringan Kualisi untuk Laut Aceh (Kuala) dan Koordinator Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak penyandang dana dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- DKP Aceh Besar. 2011. Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar, Jantho.
- Ghofar, A., D.K. Schoor, A. Halim. 2008. Selected Indonesian fisheries subsidies: quantitative and qualitative assessment of policy coherence and effectiveness. The Nature Conservation – Coral Triangle, Bali.
- Grafton, R.Q. 2009. Adaptation to Climate Change in Marine Capture Fisheries. Environmental Economics Research Hub Research Reports. The Australian National University, Australia.
- Muchlisin, Z.A., N. Fadli, A.M. Nasution, R. Astuti, Marzuki, D. Amuni. 2012a. Analisis subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi nelayan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Depik, 1(2): 107-113.
- Muchlisin, Z.A., N. Fadli, A.M. Nasution, R. Astuti, Marzuki, D. Amuni. 2012b. Analisis subsidi perikanan non BBM di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Depik, 1(3): 172-178.
- Muhammad, S. Rizal, J.M. Affan. 2012. Pengaruh ENSO (*El Niño and Southern Oscillation*) terhadap transpor massa air laut di Selat Malaka. Depik 1(1): 61-67.
- Satria, A. 2005. Kenaikan harga BBM dan subsidi perikanan. <http://kompas.com/kompas-cetak/0504/12/ilpeng/1676640.htm>. Diakses 17 November 2012.
- Wikaniati. 2011. Analisis kebijakan pemberian subsidi perikanan (solar) terhadap kelestarian sumberdaya ikan teri nasi dan pendapatan nelayan payang gemplo (Kasus TPI Wonokerto, Kabupaten Pekalongan). Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Bogor.